



**SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG**
BAGIAN ANGGARAN 005.01

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Semester II Tahun 2022
(*PENGADILAN AGAMA TANAH
GROGOT*)



UAKPA
005.01.1600.307182

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022



Jalan Kesuma Bangsa KM. 05
Telp. (0543) 22091
Kalimantan Timur
Website: www.pa-tanahgrogot.go.id
Email: patgt@pa-tanahgrogot.go.id

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(005.01.1600.307182) PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01.1600.307182

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kesuma Bangsa KM. 05 Tanah Grogot, Telp. 0543-22091

Website: www.pa-tanahgrogot.go.id, e-mail: patgt@pa-tanahgrogot.go.id

Tanah Grogot - Kalimantan Timur 76251

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 31 Desember 2022
Unit Pelaksana Teknis UAKPA/B PA Tanah Grogot
Sekretaris,



H. Muhammad Rusydi, S.Ag
NIP. 19701210 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA.....	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	5
A. PENJELASAN UMUM	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Basis Akuntansi.....	9
A.5. Dasar Pengukuran	10
A.6. Kebijakan Akuntansi	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	14
B.1. Pendapatan.....	15
B.2. Belanja	15
B.3. Belanja Pegawai.....	17
B.4. Belanja Barang.....	17
B.5. Belanja Modal.....	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	20
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.4. Piutang PNBPN	20
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	21
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar.....	21
C.8. Belanja Dibayar di Muka.....	21
C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	22
C.10. Persediaan	22
C.11. Persediaan yang Belum Diregister.....	22
C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.13. Tagihan Penjualan Angsuran	23
C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	23
C.15. Tanah	23
C.16. Peralatan dan Mesin.....	23
C.17. Gedung dan Bangunan	24
C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24
C.19. Aset Tetap Lainnya	25
C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	25
C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
C.22. Aset Tak Berwujud.....	26
C.23. Aset Lain-Lain.....	26

C.24.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.25.	Uang Muka dari KPPN.....	27
C.26.	Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.27.	Utang Yang Belum Ditagihkan	27
C.28.	Utang Jangka Pendek Lainnya	27
C.29.	Pendapatan Diterima Dimuka	27
C.30.	Ekuitas	28
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2.	Beban Pegawai	28
D.3.	Beban Persediaan	28
D.4.	Beban Barang dan Jasa	29
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	30
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	30
D.8.	Beban Bantuan Sosial	30
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31
D.11.	Kegiatan Non Operasional.....	31
D.12.	Pos Luar Biasa	31
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	32
E.1.	Ekuitas Awal.....	32
E.2.	Surplus (Defisit) LO	32
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	32
E.4.	Transaksi Antar Entitas	34
E.5.	Ekuitas Akhir	35
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	36
F.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain.....	36
	LAMPIRAN DAN DAFTAR	37

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Jl. Kesuma Bangsa KM. 05 Tanah Grogot, Telp. 0543-22091

e-mail : patgt@pa-tanahgrogot.go.id

Kalimantan Timur 76251

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Grogot, 31 Desember 2022

Unsur Pelaksanaan Teknis UAKPA/B PA Tanah Grogot

Sekretaris,



H. Muhammad Rusydi, S.Ag.

NIP. 19701210 200112 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2022 Unaudited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 Unaudited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp855.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 Unaudited adalah sebesar Rp3.228.717.636,00 atau mencapai 95,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.403.152.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.424.061.661,00 yang terdiri dari:

1. Aset Lancar sebesar Rp338.000,00;
2. Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.423.723.661,00; dan
3. Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.424.505,00 dan Rp4.395.637.156,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.488.240.090,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp3.488.240.090,00 dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.488.240.090,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(3.488.240.090,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.324.874.860,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(3.488.240.090,00) ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.559.002.386,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.395.637.156,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2022 Unaudited disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.307182) PENGADILAN AGAMA
TANAH GROGOT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2022 UNAUDITED DAN TAHUN 2021 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% thd Angg	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan PNPB		14.596.000	4.924.106	33,74	6.701.776
JUMLAH PENDAPATAN		14.596.000	4.924.106	33,74	6.701.776
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	11.337.794.000	11.319.379.002	99,84	7.725.524.423
Belanja Barang	B.4	3.783.481.000	3.753.002.912	99,19	3.105.344.819
Belanja Modal	B.5	222.500.000	219.391.120	98,60	37.500.000
Belanda Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		15.343.775.000	15.291.773.034	99,66	10.868.369.242

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.01.1600.307182) PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.8	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	1.414.850	3.056.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.11	0	0
Jumlah Aset Lancar		1.414.850	3.056.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.12	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.15	36.743.497.000	36.743.497.000
Peralatan dan Mesin	C.16	5.135.590.035	4.903.291.035
Gedung dan Bangunan	C.17	7.559.595.120	7.363.023.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.19	12.770.665	12.770.665
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(5.559.537.306)	(5.174.167.513)
Jumlah Aset Tetap		43.891.915.514	43.848.414.187
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	4.950.000	4.950.000
Aset Lain-Lain	C.23	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(4.950.000)	(4.950.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		43.893.330.364	43.851.470.687
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	2.785.707	42.150.632
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.29	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.785.707	42.150.632
JUMLAH KEWAJIBAN		2.785.707	42.150.632
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	43.890.544.657	43.809.320.055
JUMLAH EKUITAS		43.890.544.657	43.809.320.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43.893.330.364	43.851.470.687

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.01.1600.307182) PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.924.106	6.701.750
JUMLAH PENDAPATAN		4.924.106	6.701.750
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.289.654.002	7.755.249.423
Beban Persediaan	D.3	38.495.400	32.881.625
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.202.986.956	1.813.061.375
Beban Pemeliharaan	D.5	632.340.545	747.086.935
Beban Perjalanan Dinas	D.6	871.181.736	512.098.708
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	385.369.793	396.776.474
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		15.420.028.432	11.257.154.540
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15.415.104.326)	(11.250.452.790)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	26
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	26
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	26
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(15.415.104.326)	(11.250.452.764)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(15.415.104.326)	(11.250.452.764)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.01.1600.307182) PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	43.809.320.055	44.197.748.144
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15.415.104.326)	(11.250.452.764)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15.496.328.928	10.862.024.675
EKUITAS AKHIR	E.5	43.890.544.657	43.809.320.055

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dasar hukum dan/atau pedoman/panduan/kebijakan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanah Grogot Semester II Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaL Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
36. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid-19; dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
37. Surat Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor S-32/PB/PB.6/2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN

Periode Semester II Tahun 2022

38. Surat Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022
39. Surat Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor S-45/PB/PB.6/2022 tentang Penjelasan dan Tindak Lanjut atas akun dengan uraian *null* dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022
40. Surat Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 *Unaudited*
41. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 Tentang Pedoman Akutansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
42. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/SEK/KU.00/1/2023 tentang Perlakuan Akutansi, Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II TA 2022

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot

*Entitas dan
Rencana
Strategis*

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan instansi vertikal Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.24, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

- Misi Mahkamah Agung:
 - 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai Visi dan Misinya.
- Visi Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah “Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot”.
- Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) dituangkan

usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
 - 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 - 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 - 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
 - 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
 - 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
 - 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
 - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 - 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.
- Misi Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah :
 - 1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot ;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Provinsi Kalimantan Timur ;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot ;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot ;
 - Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - 1) Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Tanah Grogot yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
 - 2) Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam wilayah hukumnya;
 - 3) Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.
 - Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai berikut :
 - 1) Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot satu tahun ke depan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
 - 2) Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Tujuan dan Sasaran Strategis PTA Samarinda

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Peningkatan penyelesaian perkara Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah sisa perkara
2	Peningkatan tertib administrasi perkara Jumlah berkas yang daftar dan diregister dan siap disidangkan dan didistribusikan ke Majelis Hakim Jumlah berkas perkara yang diselesaikan/diputus oleh Majelis Hakim Jumlah berkas perkara yang diselesaikan, diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju)
3	Peningkatan kualitas SDM Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
4	Peningkatan kualitas pengawasan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yang ditindaklanjuti
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan



3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses Bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul. Beberapa modul SPAN yang ada di SAKTI adalah:

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator.

Interkoneksi antara SPAN dengan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan terjadi pertukaran/komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN. Interkoneksi difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara Satker dan KPPN untuk menerima dan mengirim data dari SPAN, sehingga terjadi pertukaran data secara berkala yang tidak memberatkan dan merepotkan satker



4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 Unaudited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. *Belanja*

- Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. *Beban*

- Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. *Aset*

- Aset
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar (1) *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap (2) *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap (3) *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

(4) *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

(5) *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
Franchise	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6. *Kewajiban*

- Kewajiban
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) Kewajiban Jangka Pendek**
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang**
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. *Ekuitas*

- Ekuitas
- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.343.775.000. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA Awal, revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 10 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	31 Desember 2022	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	14.596.000	14.596.000
Jumlah Pendapatan	14.596.000	14.596.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.337.794.000	11.319.379.002
Belanja Barang	3.783.481.000	3.753.002.912
Belanja Modal	222.500.000	219.291.120
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15.343.775.000	15.291.673.034

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp4.924.106,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.924.106,00 atau mencapai 33,74% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.596.000,00. Rincian pendapatan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2022		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.596.000	4.924.106	33,74
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	14.596.000	4.924.106	33,74

bahwa realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tanah Grogot

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 Unaudited mengalami penurunan sebesar (27)% dibandingkan Tahun 2021 Audited yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.924.106	6.701.750	(27)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26	(100)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	4.924.106	6.701.776	(27)

B.2. Belanja

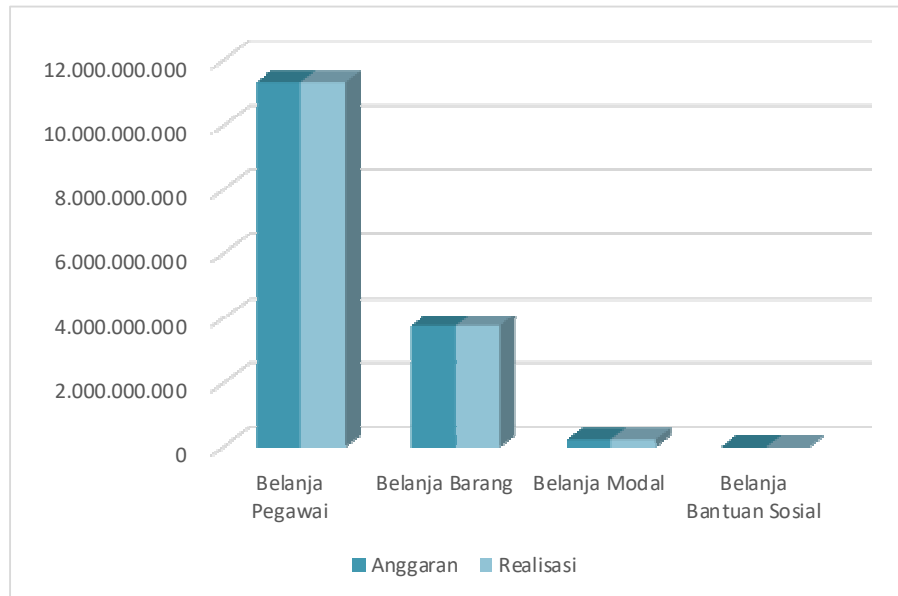
Realisasi Belanja
Negara
Rp15.291.773.034,00

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2022 Unaudited adalah sebesar Rp15.291.773.034,00 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp15.343.775.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 Unaudited adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Unaudited

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.319.379.002	11.323.574.118	100
Belanja Barang	3.753.002.912	3.753.002.912	100
Belanja Modal	219.291.120	219.391.120	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	15.291.673.034	15.295.968.150	100
Pengembalian		(4.195.116)	100
Jumlah	15.291.673.034	15.291.773.034	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2021 Audited, Realisasi Belanja Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan 40,70% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2021 Audited. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Modal yang direalisasikan untuk penambahan daya listrik sebagai pengembangan sarana prasarana untuk aktivitas perkantoran
2. Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.
3. Meningkatnya Belanja Pegawai dikarenakan bertambahnya pegawai yang berasal dari CPNS dan mutasi Hakim Tinggi pada stuan unit kerja untuk meningkatkan kinerja satuan kerja

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.319.379.002	7.725.524.423	46,52
Belanja Barang	3.753.002.912	3.105.344.819	20,86
Belanja Modal	219.391.120	37.500.000	485,04
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	15.291.773.034	10.868.369.242	40,70

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp11.319.379.002,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp11.319.379.002,00 dan Rp7.725.524.423,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan sebesar 46,52% dari Tahun 2021 Audited. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai dan perekrutan CPNS baru tahun 2022

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.323.574.118	7.725.709.697	46,57
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	11.323.574.118	7.725.709.697	46,57
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.195.116)	(185.274)	2.164,28
Jumlah Belanja	11.319.379.002	7.725.524.423	46,52

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp3.753.002.912,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp3.753.002.912,00 dan Rp3.105.344.819,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan sebesar 20,86% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 Audited. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan sepanjang Tahun 2022 Unaudited.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	855.782.309	808.148.972	5,89
Belanja Barang Non Operasional	94.377.000	56.381.000	67,39
Belanja Barang Persediaan	36.929.575	34.942.850	5,69
Belanja Jasa	1.262.467.572	946.686.354	33,36
Belanja Pemeliharaan	632.264.720	747.086.935	(15,37)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	871.181.736	512.098.708	70,12
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	3.753.002.912	3.105.344.819	20,86
Pengembalian Belanja	-	-	0
Jumlah Belanja	3.753.002.912	3.105.344.819	20,86

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp219.391.120,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp219.391.120,00 dan Rp37.500.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan sebesar 485,04% dibandingkan Tahun 2021 Audited disebabkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa 1 P.C unit sebesar Rp.13.099.000,00 dan 2 Printer (Peralatan Personal Komputer) sebesar

Rp.9.720.000,00

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa penambahan daya listrik sebesar Rp.196.572.120,00

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.819.000	37.500.000	(39,15)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.572.120	0	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	219.391.120	37.500.000	17,09
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	219.391.120	37.500.000	485,04

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun 2022 Unaudited tidak mengalami perubahan sebesar 0% dibandingkan Tahun 2021 Audited dikarenakan Belanja Modal Tanah tidak masuk dalam anggaran Tahun 2022 .

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp22.819.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 Unaudited adalah sebesar Rp22.819.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 39,15% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 Audited sebesar Rp37.500.000,00 dikarenakan pada Semester I TA 2021 belum melakukan realisasi belanja modal.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.819.000	37.500.000	(39,15)
Jumlah Belanja Kotor	22.819.000	37.500.000	(39,15)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	22.819.000	37.500.000	(39,15)

Bahwa realisasi Belanja Modal pada Tahun 2022 Unaudited berupa 1 P.C unit sebesar Rp.13.099.000,00 dan 2 Printer (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp.9.720.000,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp196.572.120,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp196.572.120,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan Realisasi Tahun 2021 Audited dikarenakan penambahan daya listrik sebagai pengembangan sarana prasarana untuk aktivitas

perkantoran

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.572.120	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	196.572.120	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	196.572.120	0	(100,00)

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 Unaudited tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2021 Audited dikarenakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada dalam anggaran Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2022 Unaudited tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2021 Audited. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal lainnya selama Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited.

B.5.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2022 Unaudited tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2021 Audited. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja bantuan sosial selama Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rekening Bank	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

C.4. Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap

pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di
Muka Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum

diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

**Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pembayaran Domain dan Hosting	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

C.10. Persediaan

*Persediaan
Rp1.414.850,00*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.414.850,00 dan Rp3.056.500,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	1.414.850	3.056.500
Barang untuk Pemeliharaan	-	0
Bahan Baku	-	0
Jumlah	1.414.850	3.056.500

Sampai dengan periode yang berakhir per 31 Desember 2022, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan dikelompokkan ke dalam barang konsumsi dan barang persediaan untuk pemeliharaan dan berdasarkan hasil opname fisik dinyatakan bahwa semua barang persediaan dalam kondisi baik.

C.11. Persediaan yang Belum Diregister

*Persediaan yang
Belum Diregister
Rp0,00*

Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan yang Belum Diregister muncul akibat satuan kerja belum melakukan penyelesaian melalui transaksi GUP atas pembelian barang-barang persediaan.

C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Debitur	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.13. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Debitur	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.15. Tanah

Tanah
Rp36.743.497.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja di wilayah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.743.497.000,00 dan Rp36.743.497.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	36.743.497.000
Mutasi tambah:	0
Hibah Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	0
Akumulasi Penyusutan	0
Saldo per 31 Desember 2022	36.743.497.000

C.16. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp5.135.590.035,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp5.135.590.035,00 dan Rp4.903.291.035,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.903.291.035
Mutasi Tambah	232.299.000
Pembelian	22.819.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transaksi Normalisasi BMN	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Transfer Masuk	209.480.000
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Transfer Keluar	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
Saldo per 31 Desember 2022	5.135.590.035
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	4.543.128.182
Nilai Buku per 31 Desember 2022	592.461.853

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang untuk aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

17. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp7.559.595.120,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp7.559.595.120,00 dan Rp7.363.023.000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7.363.023.000
Mutasi tambah:	196.572.120
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Pengembangan Nilai Aset	196.572.120
Saldo Awal	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Koreksi Perubahan Kondisi	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2022	7.559.595.120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	1.016.409.124
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6.543.185.996

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas aset jalan, irigasi dan jaringan ini dengan mengacu pada hasil kesepakatan dan kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk setiap aset berupa jalan, jembatan, jaringan dan irigasi untuk yang instalasinya melekat pada gedung agar diakui sebagai

aset gedung dan bangunan mengingat aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi bukan merupakan aset yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan, maka seharusnya di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi yang memiliki aset ini.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

C.19. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp12.770.665,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp12.770.665,00 dan Rp12.770.665,00. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	12.770.665
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2022	12.770.665
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	12.770.665

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.559.537.306,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp5.559.537.306,00 dan Rp5.174.167.513,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	36.743.497.000	0	36.743.497.000
2	Peralatan dan Mesin	5.135.590.035	4.543.128.182	592.461.853
3	Gedung dan Bangunan	7.559.595.120	1.016.409.124	6.543.185.996
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	12.770.665	0	12.770.665
	Akumulasi Penyusutan	12.707.955.820	5.559.537.306	7.148.418.514

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

022. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp4.950.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.950.000,00 dan Rp4.950.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.950.000
Mutasi tambah:	0
Software	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2022	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	4.950.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

023. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

024. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp4.950.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp4.950.000,00 dan Rp4.950.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tidak Berwujud	4.950.000	4.950.000	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	4.950.000	4.950.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.25. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Seluruh Uang Muka dari KPPN ini per 31 Desember 2022.

C.26. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.785.707,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.785.707,00 dan Rp42.150.632,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan bahwa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa uang makan Desember sedangkan Belanja Barang yang Masih Dibayar berupa tagihan air, telpon dan pos. Sedangkan tagihan listrik akan dikelola atau dibayarkan oleh satuan kerja Badan Urusan Administrasi, adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.785.707	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	
Total	2.785.707	

C.27. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0,00

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bahwa Utang yang Belum Ditagihkan merupakan Kwitansi yang belum di GUP dan BAST belanja Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum SP2D pada bulan September yang di pertanggungjawaban pada bulan Oktober melalui GUP dan GUP KKP.

C.28. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.29. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.31
Ekuitas
Rp43.890.544.657,00

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.890.544.657,00 dan Rp43.809.320.055,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1.
Pendapatan PNB
Rp4.924.106,00

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.924.106,00 dan Rp6.701.750,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.924.106	6.701.750	- 26,53
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0
Pendapatan PNB	4.924.106	6.701.750	- 26,53

Terhadap pendapatan yang diperoleh dalam laporan operasional ini, diperoleh dari total pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditambah Pendapatan non kas dan piutang atau pendapatan ditangguhkan dikurangi dengan Pendapatan dibayar di muka.

D.2.
Beban Pegawai
Rp11.289.654.002,00

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp11.289.654.002,00 dan Rp7.755.249.423,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	11.289.654.002	7.755.249.423	45,57
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	11.289.654.002	7.755.249.423	45,57

D.3.
Beban Persediaan
Rp38.495.400,00

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp38.495.400,00 dan Rp32.881.625,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	38.495.400	32.881.625	17,07
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	38.495.400	32.881.625	17,07

 **Beban Barang dan Jasa**
Beban Barang dan
Jasa
Rp2.202.986.956,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp2.202.986.956,00 dan Rp1.813.061.375,00. Dibandingkan dengan Tahun 2021 Audited, Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 Unaudited mengalami kenaikan sebesar 21,51%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2022 Unaudited. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Barang Operasional	848.195.952	785.592.172	7,97
Beban Barang Operasional - Darurat Bencana	7.950.357	22.229.800	(64,24)
Beban Barang Non Operasional	94.377.000	54.871.000	72,00
Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana	0	1.510.000	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa	140.604.047	139.347.658	0,90
Beban Sewa	1.088.662.600	739.676.745	47,18
Beban Jasa Lainnya	6.997.000	56.334.000	(87,58)
Beban Jasa Profesi	16.200.000	13.500.000	20,00
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Jumlah	2.202.986.956	1.813.061.375	21,51

 **Beban Pemeliharaan**
Beban Pemeliharaan
Rp632.340.545,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp632.340.545,00 dan Rp747.086.935,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited**

Beban Barang Non Operasional - Darurat Bencana	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270.876.400	384.384.872	(29,53)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.388.320	362.702.063	(0,36)
Beban Persediaan Bahan untuk Operasional	75.825	0	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Jumlah	632.340.545	747.086.935	(15,36)

Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp871.181.736,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp871.181.736,00 dan Rp512.098.708,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan daerah dan surveillance ZI dan APM. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	329.405.378	286.280.183	15,06
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.590.000	10.410.000	117,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	182.783.282	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	336.403.076	215.408.525	56,17
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Jumlah	871.181.736	512.098.708	70,12

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.307182) Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun)%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp385.369.793,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp385.369.793,00 dan Rp396.776.474,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	198.929.079	212.447.179	(6,36)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	186.440.714	183.710.545	1,49
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	385.369.793	396.157.724	(2,72)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	618.750	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	618.750	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	385.369.793	396.776.474	(2,87)

0.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	0	0	0
Jumlah	0	0	0

0.11. Kegiatan Non Operasional

dari Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

Pos defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	0	26	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0
Pendapatan Rampasan/Sitaan	0	0	0
Jumlah	0	26	(100,00)

0.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp43.809.320.055,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.809.320.055,00 dan Rp44.197.748.144,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit-LO
Rp15.415.104.326,00 Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebesar Rp15.415.104.326,00 dan Rp11.250.452.764,00. Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00 Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2022 Unaudited adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022 Unaudited

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terjadi di satuan kerja terhadap asset-asset yang tercatat dalam kelompok asset yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI namun hanya perubahan nama dan kodifikasi asetnya dan tidak merubah nilainya.

E.3.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0
SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0
Penyesuaian SAL BLU	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp15.496.328.928,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Tahun 2022 Unaudited dan Tahun 2021 Audited adalah masing-masing sebesar Rp15.496.328.928,00 dan Rp10.862.024.675,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.291.773.034
Diterima dari Entitas Lain	(4.924.106)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	209.480.000
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0
Setoran Surplus BLU	0
Jumlah	15.496.328.928

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari
Entitas Lain (DDEL)
Rp4.924.106,00
/Ditagihkan ke
Entitas Lain (DKEL)
Rp15.291.773.034,0
0

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode Tahun 2022 Unaudited, DDEL sebesar Rp4.924.106,00 sedangkan DKEL sebesar Rp15.291.773.034,00.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

No	Kode	Uraian	Debet	Kredit
1	402480	PTA Samarinda	4.924.106	0
		JUMLAH	4.924.106	0

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

No	Kode	Uraian	Debet	Kredit
1	402480	PTA Samarinda	0	15.291.773.034
		JUMLAH	0	15.291.773.034

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp209.480.000,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Rp209.480.000,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, barang tersebut yaitu, Peralatan dan mesin berupa Laptop dan Scanner dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar/Transfer Masuk Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
1	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	209.480.000	005.01.402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	209.480.000
		JUMLAH	209.480.000		JUMLAH	209.480.000

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp0,00
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari total Rp0,00 yang diterima sepanjang 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 31 Desember 2022

No	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
	NIHIL			
	Total Pengesahan			0
	Pengesahan Pengembalian Hibah			0
	Total Pengesahan			0
	Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 Unaudited disajikan pada lampiran.

E.5. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir Rp43.890.544.657,00
Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.890.544.657,00 dan Rp43.890.544.657,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

*Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca*

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

*Pengungkapan Lain-
Lain*

Tidak ada pengungkapan lainnya

LAMPIRAN DAN DAFTAR